

## **BAB III**

### **PARTAI DAMAI SEJAHTERA PADA PEMILU 2004**

#### **A. Format Pemilu 2004**

Format politik menuju 2004 merupakan pemantapan dari apa yang telah di capai pada Pemilu 1999. Beberapa perubahan mendasar terjadi dengan diberlakukannya undang-undang pemilu dan kepartaian baru. Undang-undang baru yang digunakan sebagai landasan Pemilu 2004 adalah UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan UU No.23 tentang Pemilu Presiden. Berbeda dengan Undang-undang politik lama, dengan pemberlakuan Undang-undang ini terdapat tiga lembaga yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lembaga tersebut adalah DPD, Legislatif, dan Eksekutif.<sup>1</sup>

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih secara langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Ide dasar penggunaan sistem pemilu langsung ini adalah untuk memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat yang semula suaranya dianggap sering disalah gunakan oleh partai politik. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 120 Anggota DPD, serta Anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk masa bakti 2004-

---

<sup>1</sup> Castles, Lance. *Pemilu 2004 dalam konteks komparatif dan Historis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 74.

2009. Sedangkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran pertama dan 20 September 2004 untuk putaran kedua.<sup>2</sup>

Pemilu 2004 diadakan dengan sistem yang berbeda dari sistem-sistem sebelumnya. Pemilu untuk anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai Politik akan mendapat sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.<sup>3</sup>

Pemilihan anggota DPR dengan *open list sistem*<sup>4</sup> membawa konsekuensi bagi partai politik untuk lebih hati-hati memilih kader yang akan ditempatkan di legislatif. Melalui Undang-undang partai politik baru, sistem kepartaian dimaksudkan memberikan ketentuan untuk menyederhanakan partai-partai politik. Selanjutnya pemilihan presiden secara langsung akan membawa konsekuensi kemungkinan munculnya presiden yang berasal dari partai yang berbeda dengan partai yang mempunyai suara mayoritas di parlemen. Kedudukan presiden juga mempunyai legitimasi yang kuat karena

---

<sup>2</sup> Tim KPU, *Pemilu di Indonesia: Modul 1 Memilih Untuk Pemula*, Jakarta: KPU, 2010, hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>4</sup> *Open list sistem* adalah sistem daftar terbuka, pemilih dapat memilih partai politik dan menentukan sendiri calon legislatif yang dikehendaknya. Pemilih dapat memilih tanda gambar partai dan calon anggota legislatif. Lihat Joko Prihatmoko, *Mendemokratislan Pemilu: Dari Sistem sampai Elemen Teknis*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 107.

dipilih langsung oleh rakyat. Keadaan ini akan berpengaruh pada perbedaan pola relasi eksekutif-legislatif maupun pola relasi antar partai politik di parlemen.

### 1. Sistem Kepartaian

Undang-undang kepartaian yang baru ini masih mempertahankan terbentuknya format *moderat pluralism* dalam sistem kepartaian Indonesia. Dalam Undang-undang ini juga terlihat mulai diusahakan terbentuknya sistem kepartaian yang lebih sederhana. Hal ini terlihat dari keberadaan pasal-pasal yang memuat persyaratan yang lebih ketat untuk mendirikan partai politik. Persyaratan tersebut tercantum pada pasal 2, terutama ayat 2(b) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang berbunyi,

“ Partai politik mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

Ketentuan ini dipertegas lagi melalui UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, pasal 7 pada bagian pertama peserta pemilu dari partai politik, yang mensyaratkan beberapa kondisi agar partai politik dapat menjadi peserta pemilu. Syarat tersebut antarlain memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di dua pertiga dari seluruh Kabupaten/kota di provinsi yang dimaksud pada bagian sebelumnya. Syarat lain adalah mempunyai anggota minimal 1000 orang atau

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2011, hlm. 11.

minimal 1/1000 (seper seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang disyaratkan sebelumnya. Keanggotaan ini harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik.<sup>6</sup>

Kursi DPR-RI yang diperebutkan dalam Pemilu 2004 seluruhnya berjumlah 550 kursi. Jatah kursi untuk TNI/POLRI mulai Pemilu 2004 telah dihapus sehingga tidak lagi mempunyai perwakilan di DPR, otomatis ke 550 kursi tersebut diperebutkan melalui pemilu langsung. Sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota legislatif pada 2004 adalah dengan menggunakan *open list sistem* berarti dalam memberikan suaranya pemilih selain mencoblos tanda gambar partai politik yang menjadi pilihannya juga diikuti dengan mencoblos salah satu nama kandidat legislatif yang tertera dalam daftar caleg partai yang bersangkutan. Pemilu 2004 di Indonesia, suara pemilih tetap dianggap sah walau hanya memilih tanda gambar partai saja walaupun tidak mencoblos nama kandidat yang tersedia. Jika hal ini terjadi, maka pemilih dianggap menyerahkan kewenangan penentuan kandidat terpilih kepada partai politik yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Sedangkan sistem perwakilan berimbang menggunakan perhitungan proporsi yang tidak lagi sesederhana yang digunakan pada pemilu sebelumnya. Semula untuk menghitung perbandingan

---

<sup>6</sup> Castles, Lance. *Op.cit.*, hlm 23.

<sup>7</sup> Tim KPU, *op.cit.*, hlm. 20.

suara dengan kursi hanya dilakukan dengan membagi jumlah perolehan suara sah dengan jumlah kursi yang tersedia untuk mengetahui beberapa proporsi suara yang diperlukan untuk satu kursi. Dalam pemilu 2004, jumlah penduduk turut menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan proporsi kursi. Jadi jumlah suara yang diperlukan untuk mendapatkan satu kursi di satu daerah mungkin berbeda dengan jumlah suara yang diperlukan untuk mendapatkan satu kursi di daerah lain, tergantung dari jumlah penduduknya. Ketentuan tentang jumlah kursi ini dimuat dalam UU No.12 Tahun 2003 Pasal 47 dan 48.<sup>8</sup>

## 2. Sistem Pemilu Presiden-Wakil Presiden

Setelah berlangsungnya Pemilu legislatif 2004, pemilu lain yang diselenggarakan adalah Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara langsung. Hal ini menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi berada dalam wewenang MPR, tetapi langsung berada ditangan rakyat. Landasan hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden adalah UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang ini kandidat presiden dan wakil presiden harus diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan calon

---

<sup>8</sup> Dirdjosanjata, Pradjarta, dan Kana L Niko, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 94.

presiden dan wakilnya harus mempunyai kursi di DPR minimal 15 % atau jumlah perolehan suara sah secara nasional minimal 20 %.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 66 dan 67 UU No.23 Tahun 2003 pasangan calon yang terpilih menjadi presiden adalah pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 % dari total jumlah suara dengan persebaran suara minimal 20 % di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persyaratan ini, diadakan pemilihan presiden putaran kedua yang pesertanya adalah dua kandidat yang memperoleh suara pertama dan kedua dalam pemilihan presiden putaran pertama.

## **B. Strategi Partai Damai Sejahtera pada Pemilu 2004**

### **1. Strategi di Pusat**

Langkah pasti yang diambil oleh Partai Damai Sejahtera dibawah pimpinan Ruyandi Hutasoit adalah memberikan pendidikan politik dan penyadaran kepada masyarakat tentang kondisi bangsa yang mulai tergerus dengan sikap-sikap primordialisme<sup>10</sup> serta mengancam keberadaan Pancasila yang menjadi dasar negara. Terjadinya pembakaran tempat ibadah dan munculnya kebijakan-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>10</sup> Primordialisme adalah loyalitas berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kebijakan yang dirasa kurang tepat dengan UUD 1945 membuat para pengurus partai dan kader membuat strategi guna meraih suara sebanyak mungkin sehingga dapat mengirim wakil rakyat yang berjuang di gedung parlemen. Strategi–strategi tersebut adalah :

1) Program Yusuf 2004

Yusuf 2004 merupakan program kemenangan pemilu 2004, dimana PDS menempatkan diri sebagai minoritas yang tertekan, namun memiliki kekuatan politik yang baik dan tidak pendendam. Program ini diambil dari kisah Yusuf yang dibuang saudara-saudaranya ke tanah Mesir.<sup>11</sup> Program ini dimaksudkan untuk mensukseskan umat Kristen menjadi minoritas unggul di Indonesia.

Minoritas unggul yang dimaksud adalah minoritas yang teguh pendirian dan tidak terpengaruh arus mayoritas, minoritas yang rendah hati, pengampun, sabar dan mensejahterakan bangsa. Demi tercapainya target dalam program Yusuf 2004, maka PDS melakukan berbagai kampanye simpatik. Ini dapat dilihat dari berbagai cara menggaet massa dan pemilih dari golongan Kristen

---

<sup>11</sup> Kisah Yusuf terdapat dalam Kitab Kejadian 37, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir, Yusuf mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, sebagai orang asing disana Yusuf dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Akan tetapi kejujuran dan ketaatan Yusuf dalam proses membuat Yusuf berhasil menjadi orang yang sukses di Mesir. Yusuf diangkat menjadi penguasa atas seluruh Mesir oleh Firaun. Keberhasilannya tidak membuat dia berniat untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya, sebaliknya dengan rendah hati Yusuf membantu keluarganya yang mengalami kekurangan bahan pangan di negeri mereka. Lihat Alkitab:Kejadian. Lembaga Alkitab Indonesia.

maupun Katolik. PDS pada Pemilu 2004 sangat memegang teguh nilai-nilai Kristiani, namun partai ini tidak pandang bulu dalam berkampanye hal ini menimbulkan simpatik konstituennya. Contohnya ketika peristiwa Gempa Bumi mengguncang Yogyakarta, DPW PDS memberi bantuan berupa 200 ton beras yang disalurkan melalui Bapak Siswo Wardoyo selaku sekretaris DPW. Bantuan tersebut didistribusikan di daerah Bantul, dekat dengan kediamannya.<sup>12</sup>

## 2) Pendidikan Politik Bagi Caleg dan Masyarakat

Para elit politik mulai banyak dikritisi oleh masyarakat, sehingga seolah masyarakat tampak lebih pandai daripada elit politik yang ada. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar mengingat pada kenyataan masih banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah masih jauh dari harapan rakyat.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan yaitu sejauh mana peran pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, baik pendidikan politik yang dilakukan kepada para kader maupun kepada masyarakat. Ketidapahaman dalam memilih hanyalah salah satu alasan dari terpilihnya elit politik yang kinerjanya jauh dari harapan. PDS melihat bahwa memberikan pendidikan politik bagi kader-kadernya adalah hal yang sangat mendasar agar mereka

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Siswo Wardoyo, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 23 September 2013



memiliki kesadaran politik yang rasional sehingga mampu merumuskan kebijakan yang menjawab persoalan masyarakat.

Pendidikan politik yang dilakukan PDS menyentuh sampai ke daerah, selain para kader aktif PDS juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama kaum kristen. Mulai dari mengumpulkan para tokoh agama Kristen, mengumpulkan massa, sampai membuat seminar-seminar kebangsaan yang mengangkat isu-isu diskriminatif yang dialami oleh kaum minoritas.<sup>13</sup>

### 3) Pendekatan Tokoh

Hal yang tidak mudah untuk menarik simpatikan dalam jumlah besar, untuk itu PDS melakukan pendekatan ke banyak tokoh masyarakat. Pendekatan tokoh yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka pendekatan yang dilakukan kepada tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat Kristiani dari tingkat nasional sampai tingkat lokal. Harapannya ketika para tokoh tersebut mendukung perjuangan partai, maka massa dikalangan bawah ikut mendukung dan memilih karena peran tokoh yang masih cukup kuat.

Tokoh-tokoh Kristen sangat diperlukan menjadi media interaksi masyarakat karena mereka dikenal cukup baik serta disegani dan biasanya menjadi panutan masyarakat disekitarnya.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Paulus Sentot Purwoko, S.Th, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 22 September 2013.

Menyadari hal tersebut pengurus pusat terus melakukan pendekatan dan berusaha meyakinkan para tokoh bahwa perjuangan yang dilakukan partai adalah perjuangan yang sangat diperlukan oleh kalangan minoritas.

#### 4) Sosialisasi

Munculnya citra yang baik kepada partai dan bisa dimaknai secara baik oleh masyarakat adalah hal yang diinginkan oleh partai. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari adanya sosialisasi yang baik untuk meningkatkan elektabilitas partai. Melalui sosialisasi, partai mampu menyampaikan tentang apa itu PDS, perjuangannya dan apa kegiatannya kepada kalangan gereja, dan umat kristiani serta lapisan masyarakat lainnya.

Pengetahuan masyarakat akan keberadaan PDS dapat membuat dukungan kepada partai terus meningkat, karena jika dilihat dari isi perjuangannya sesuai dengan apa yang dialami oleh kaum minoritas saat itu. Bahkan dari kalangan masyarakat bawah non-kader juga ikut berbondong-bondong berjuang dan mesosialisasikan keberadaan partai ini dan perjuangannya.<sup>14</sup>

Sampai pada pelaksanaan Pemilu 2004 PDS terus melakukan sosialisasi demi memperoleh kursi di DPR. Pengurus dari tingkat pusat sampai tingkat cabang terus menjalin hubungan baik dengan simpatisan partai. Tidak hanya berhenti pada sosialisasi tentang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Albert Yusuf Langke, Yogyakarta, Tanggal 4 Oktober 2013.

perjuangan partai, namun PDS juga dalam beberapa kesempatan menunjukkan kepedulian kepada kelompok yang termarginalkan.<sup>15</sup>

## 2. Strategi di Daerah

### 1) Pemantapan Caleg

Membuka seluas-luasnya bagi para masyarakat Kristen yang ada di daerah untuk menjadi caleg merupakan langkah yang diambil demi mendapatkan suara yang banyak di daerah. Meskipun secara hitungan sangat sulit untuk mendapatkan kursi di daerah yang kaum Kristen merupakan golongan minoritas. Contoh daerah tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, walau sulit untuk mendapatkan kursi parlemen para pengurus mengambil strategi untuk membuka caleg sebanyak-banyaknya. Harapannya melalui mereka kampanye akan terjadi dimana-mana dan dapat memperkenalkan PDS kepada banyak orang.<sup>16</sup>

Dalam pemilihan caleg yang ada di daerah, para pengurus menempatkan para tokoh-tokoh yang sudah cukup dikenal di kalangan orang Kristen. Para tokoh tersebut antara lain rohaniawan, tokoh politik kristen, dan tokoh-tokoh pengusaha kristen yang mengerti politik. Pemilu 2004 yang memakai format

---

<sup>15</sup> Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, *Partai Salib Demi Kebangsaan*, Jakarta:Gramedia, 2007, hlm 81.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Siswo Wardoyo, Bantul, Yogyakarta, Tanggal 23 September 2013.

pemilihan langsung membuat para caleg harus berkampanye untuk membantu partai meraih suara pada pemilu.

## 2) Kampanye

Sesuatu yang selalu identik dengan Pemilu dan partai politik adalah kampanye. Semua partai politik berkampanye demi menarik hati rakyat, metode dan model kampanyepun terus berkembang seiring perkembangan zaman. PDS juga memanfaatkan waktu-waktu kampanye yang ditetapkan KPU, akan tetapi kampanye yang dilakukan PDS di daerah Yogyakarta berbeda dengan partai lain. PDS melakukan kampanye dengan pendekatan personal dan kelompok. PDS tidak mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak di lapangan, berarak-arakan di jalan raya, dan memasang bendera dan gambar calon secara berlebihan.<sup>17</sup>

Pengurus daerah menjunjung keefektifan dalam berkampanye. Fokus pendekatan kepada golongan Nasrani menjadi ciri pada Pemilu 2004. Para simpatisan dan kader memasang bendera partai dan gambar calon di daerah-daerah yang strategis, seperti dekat tempat ibadah, persimpangan jalan, dan memberikan bendera kepada para simpatisannya untuk dipasang di depan rumah mereka masing-masing.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Albert Yusuf Langke, Yogyakarta, Tanggal 4 Oktober 2013.

### C. Partai Damai Sejahtera dan Pemilu 2004

#### 1. Pemilu Legislatif

Partai Politik yang mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2004 sebanyak 50 partai. Sebanyak 12 Partai dinyatakan lolos pada tahap pertama, dan 12 partai lagi dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU. Secara keseluruhan dari 50 Partai politik yang mendaftar ada 26 Partai yang tidak lolos verifikasi KPU (Lihat Lampiran 3). PDS pada Pemilu 2004 muncul sebagai partai Kristen tunggal. PDS mengalahkan para pesaing-pesaingnya sesama partai kristen. Empat partai tersebut adalah Partai Kristiani, PDKB, Parkindo 45, dan Katolik Demokrat.<sup>18</sup>

Munculnya PDS membuat semangat politik yang kuat karena cita-citanya adalah memperjuangkan kaum minoritas bila ada yang tidak mendapat hak-nya sebagai warga negara. Keberhasilan PDS juga tidak lepas dari militansi kader partai yang terus memperjuangkan partai ini untuk bisa menjadi partai peserta pemilu 2004. Keberhasilan PDS menjadi peserta pemilu memunculkan kesadaran partisipasi politik dikalangan umat kristen. Pada era orde baru hingga awal reformasi, berpolitik bagi mayoritas umat Kristen dianggap kotor dan

---

<sup>18</sup> Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, *Partai-Partai Politik di Indonesia: Ideologi dan Program (2004-2009)*. Jakarta: Kompas, 2004, hlm.257.

tidak rohani, sehingga pola pikir umat kristiani adalah menjauhi politik.<sup>19</sup>

Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kali ini memilih wakil-wakilnya secara langsung untuk duduk di parlemen dan pemilihan secara langsung Presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 mendapat perhatian yang sangat luas karena perbedaan sistem ini, terutama bagi kalangan Kristiani Pemilu kali ini menjadi berbeda dengan munculnya PDS dengan kader-kader yang dipilih langsung, membuat daya tarik tersendiri bagi umat Kristiani untuk menentukan pilihan politiknya.<sup>20</sup> Pemilu legislatif yang diadakan serentak pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 Parpol, berbeda dengan pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 1999 yang diikuti sebanyak 48 Parpol.

Menghadapi Pemilu 2004 merupakan tantangan bagi PDS karena partai ini harus menghadapi fakta dimana kecenderungan umat Kristiani untuk berpolitik saat itu rendah, dan juga ketidakpercayaan masyarakat terhadap situasi politik saat itu membuat PDS harus bekerja keras meyakinkan adanya harapan perubahan di partai yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran Kristiani ini. Fakta lain menyebutkan juga bahwa keberadaan partai berbasis Kristen pada Pemilu 1999 tidak mendapat perhatian lebih di masyarakat Kristen saat

---

<sup>19</sup> Zakaria J. Ngelow. Partisipasi Umat Kristen Indonesia di Bidang Politik. *INTIM-Jurnal STT Makassar Edisi No.5, 2003*, hlm. 44.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Sugiarto, S.Th, Purwokerto, Banyumas, Tanggal 12 September 2013.

itu. Akan tetapi, fakta-fakta tersebut tidak membuat partai ini gentar menghadapi Pemilu 2004, diiringi doa dan usaha serta pendekatan yang berbeda dengan menekankan penuh nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, maka partai ini terus maju dan mendapat akhirnya simpati dari masyarakat Kristiani.<sup>21</sup>

Menjelang dan selama kampanye, PDS terus melakukan konsolidasi hingga ke daerah-daerah. Pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, dan mengumpulkan massa Kristiani terus dilakukan guna meyakinkan bahwa partai ini akan membawa perubahan. Ruyandi Hutasoit dan para pengurus pusat sangat giat untuk ke daerah-daerah melakukan sosialisasi tentang partai baru ini. Seleksi calon anggota legislatifpun cukup efektif, PDS membuka kesempatan bagi para pendeta, artis, dan tokoh-tokoh kristen yang peduli akan perubahan di bangsa ini untuk berlomba meraih suara dan tempat di hati rakyat.<sup>22</sup>

Pemilu legislatif 2004 mencatat perolehan suara PDS cukup menggemparkan situasi politik saat itu, partai baru ini berhasil meraih 2.414.254 suara. PDS berada di peringkat 9 dengan 2,13 % dari total 113.462.414 suara pada Pemilu 2004. Perolehan suara yang cukup signifikan ini membuat PDS berhasil meraih 13 Kursi di DPR-RI.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Cornelis Kailas Bidara, Yogyakarta, Tanggal 28 September 2013.

<sup>22</sup> R. Sianturi, *Mengapa Harus Memilih Hanya Satu Partai Kristiani*, Jakarta: DPP PDS, 2004, hlm. 10.

Partai ini meraih 2,13 % suara, artinya tidak mencapai *Electrolal Treshold*<sup>23</sup> 3% sehingga tidak dapat mengusung calon presidennya sendiri. Disisi lain, keberhasilan PDS adalah adanya 13 caleg yang mampu meraih suara tinggi di daerah untuk kursi DPR-RI, lebih daripada itu PDS berhasil menempatkan 52 orang untuk duduk di kursi DPRD Provinsi Tingkat I dan 329 orang di DPRD Kabupaten dan Kota Tingkat II. Perolehan 13 kursi di pusat membuat PDS berniat membentuk satu fraksi, akan tetapi peraturan saat itu tidak memungkinkan untuk membentuk satu fraksi sendiri di DPR-RI. Karena pada perhitungan pembentukan satu fraksi minimal harus ada 17 orang anggota.<sup>24</sup>

**Tabel. 1**  
**Perolehan Kursi DPR-RI**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase
1.	Partai Golongan Karya	127	23.09%
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109	19.82%
3.	Partai Persatuan Pembangunan	58	10.55%
4.	Partai Demokrat	56	10.18%
5.	Partai Amanat Nasional	53	9.64%
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	52	9.45%
7.	Partai Keadilan Sejahtera	45	8.18%
8.	Partai Bintang Reformasi	14	2.55%

---

<sup>23</sup> Electoral Threshold adalah ambang batas untuk partai politik yang ditetapkan KPU pada saat pemilu untuk persyaratan pemilihan dan keikutsertaan mengikuti pemilu berikutnya. Pada Pemilu Presiden 2004 *Electrolal Treshold* juga digunakan sebagai syarat untuk partai tersebut dapat mencalonkan presiden sendiri. Lihat <http://www.pemiluindonesia.com/kamus> diakses tanggal 9 Agustus 2013

<sup>24</sup> Denny Tewu dan Paul K. Somalinggi, *op.cit.*, hlm. 59.



No.	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase
9.	Partai Damai Sejahtera	13	2.36%
10.	Partai Bulan Bintang	11	2.00%
11.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4	0.73%
12.	Partai Pelopor	3	0.55%
13.	Partai Karya Peduli Bangsa	2	0.36%
14.	PNI Marhaenisme	1	0.18%
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0.18%
16.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1	0.18%
<b>Total Kursi</b>		<b>550</b>	<b>100%</b>

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Keberhasilan PDS meraih suara dan menempatkan wakilnya di DPR tidak terlepas dari basis pemilih yang berhasil terbentuk. Penulis amati ada beberapa daerah yang menyumbangkan suara signifikan seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, NTT, dan Papua (Lihat Lampiran 5). Kantong suara yang terbentuk ternyata berada di daerah mayoritas Nasrani, ini membuktikan bahwa muatan politik yang dibawa oleh PDS adalah muatan perjuangan kaum Nasrani. Berbeda dengan daerah-daerah lain seperti Jawa dan Sumatera dimana perolehan suara PDS tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa perolehan suara PDS bergantung pada basis massa Nasrani.

## 2. Pemilu Presiden

Tatacara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengalami perubahan dari pemilu sebelumnya, pada tahun 2004 rakyat Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Hal tersebut memberikan warna baru bagi ketatanegaraan Indonesia

karena sebelumnya pemilihan presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh wakil rakyat. Langkah ini dipandang lebih demokratis karena melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pemilu Presiden tahun 2004 diikuti 5 pasangan calon pada putaran pertama. PDS yang pada Pemilu Legislatif hanya memperoleh 2,13 % tidak bisa mengusung calonnya sendiri sehingga harus berkoalisi dengan partai lain dalam pemilihan Presiden. Melalui pertimbangan dari organisasi dan suara konstituen Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendukung pasangan Mega-Hasyim.<sup>25</sup>

Pendeklarasian dukungan PDS pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Megawati dan Hasyim Muzadi dilakukan di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa 18 Mei 2004. Keduanya hadir bersama pengurus pusat PDI Perjuangan, Ketua Umum PDS Ruyandi Hutasoit dan Sekjen Denny Tewu. Ruyandi dalam pidato menyampaikan lima tuntutan bagi pasangan ini yaitu menuntut untuk memusatkan pada pemberantasan korupsi, penegakan keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil, penegakan HAM, dan penghilangan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Selanjutnya Megawati dalam pidatonya

---

<sup>25</sup> Lihat, *PDS Resmi Dukung Mega-Hasyim*, <http://www.gatra.com/2004-05-18/artikel.php?id=37371>, diakses tanggal 9 Agustus 2013.

mengatakan antara PDI Perjuangan dan PDS memiliki banyak kesamaan dan dia berjanji untuk memenuhi harapan partai itu.<sup>26</sup>

**Tabel. 2**  
**Pemilu Presiden Tahap I**

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Pengusung	Perolehan Suara	%
1.	H. Wiranto S.H I§ H. Salahuddin Wahid	Golkar PKB	23.827.512	22,19
2. u	Hj. Megawati S. KH. A. Hasyim Muzadi	PDI-P PDS	28.186.780	26,24
3. m	Prof. DR. Amien Rais DR. H. Siswono Husodo	PAN PKS	16.042.105	14,94
4. b	H. Susilo B. Yudoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	Demokrat PBB PKPI	36.070.622	33,58
5. e	DR. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	PPP	3.276.001	3,05

Sumber: [www.kpu.org](http://www.kpu.org)

Putaran Pertama pada pemilu Presiden tahun 2004 megantarkan lolosnya dua pasangan calon yang mendapatkan suara dua terbanyak dari jumlah lima calon yang mengikuti pesta demokrasi ini. Pasangan Mega-Hasyim yang diusung koalisi PDI-P dan PDS berhasil melangkah ke putaran kedua dengan perolehan suara 28.186.780 atau 26,24%.

Pada putaran kedua partai yang mendukung pasangan Mega-Hasyim bertambah. Partai Golkar dan PPP bergabung untuk

---

<sup>26</sup> Lihat, *PDS Deklarasikan Dukungan Pada Mega-Hasyim*, <http://www.tempo.co/read/news/2004/05/18/05542730/> diakses tanggal 9 Agustus 2013

mendukung pasangan Mega-Hasyim , mereka bersama PDI-P dan PDS membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Kebangsaan. Selain untuk memenangkan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, koalisi ini antara lain bertujuan meningkatkan peran dan fungsi partai politik sebagai wadah perjuangan politik rakyat dalam pengembangan demokrasi.<sup>27</sup>

Secara angka, Koalisi Kebangsaan mempunyai kekuatan untuk memenangkan pasangan Mega-Hasyim. Bila dilihat dari total kursi di DPR koalisi ini memiliki kekuatan 307 kursi dari total 550 kursi atau jika diprosentasekan Koalisi Kebangsaan memiliki 55,8 %. Namun, Pemilu Presiden 2004 suara rakyatlah yang menentukan, walau didukung oleh mayoritas partai besar dan berkuasa ternyata belum dapat mengantarkan pasangan Mega-Hasyim untuk memenangkan Pemilu Presiden tahap kedua.

**Tabel. 3**

**Pemilu Presiden Tahap II**

<b>No .</b>	<b>Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Perolehan suara</b>	<b>%</b>
2.	Hj. Megawati S. KH. A. Hasyim Muzadi	PDI-P Golkar PDS PPP	44.990.704	39,38
4.	H. Susilo B.Yudoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	P. Demokrat PKS PAN	69.266.350	60,62

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

---

<sup>27</sup> Lihat, *Koalisi Kebangsaan Berdiri*, [http://http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=4386&coid=3&caid=57&gid=2](http://http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4386&coid=3&caid=57&gid=2), diakses tanggal 9 Agustus 2013

Pasangan yang pada awalnya diusung oleh PDI-P dan PDS kembali kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Namun demikian hubungan antara PDI-P dan PDS tidak berhenti pada tataran pemilihan presiden, walau pasangan yang diusung kalah mereka secara kepentingan politik tetap menjalin hubungan yang baik. Terbukti dari beberapa perjuangan bersama tentang beberapa RUU yang dibahas di gedung parlemen.